

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ade Maman Suherman. (2002). *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie and Safa'at, 'Teori Hans Kelsen Tentang Hukum'. Sekretariat jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- G.H.S. Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris (Cet.3)*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2011). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2014). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap PT Refika Aditama*.
- Hans Kelsen. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono. (2018). *Demikian Akta Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.Satrio. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2014). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- John Selindeho. (1987). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jocelyn Cherieshta and Audrey Bilbina Putri, 'Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*,

Kamal Hidjaz. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

M. Syahrul Borman. (2019). *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*.

Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____ (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

R. Setiawan. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Binacipta.

Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Suatu Akta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saputri, S. (2023). *Tanggung Jawab Perdata Pihak Koperasi Terhadap Pengurus Koperasi Unit Desa Subur Makmur Kabupaten Batanghari Atas Perbuatan Melawan Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetarjo Soemoatmodjo. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman & Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta.

B. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH / TESIS / SKRIPSI / MAKALAH

- Ade Prima Putra. (2023). *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Nominee dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Adolf Jozan, Widhi Handoko, dan Muhamad Azhar. (2020). “Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan”. *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1.
- Agung Prianto Nugraha, Anriz Nazaruddin Halim, dan Yudha Cahya Kumala. (2024). “Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik terhadap Para Penghadap yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris”. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No. 2.
- Andika Putra Ekanugraha. (2020). “Penandatanganan Akta Notariil di Luar Kantor Notaris”. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. I No. 2.
- Andina Damayanti Saputri. (2015). “Perjanjian Nominee dalam Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia”. *Jurnal Repertorium*, Vol. XI No. 2.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*.
- Endah Pertiwi. (2018). “Tanggung Jawab Notaris akibat Pembuatan Akta Nominee”. *Jurnal Ius*, Vol. VI No. 2.

- Endah Pertiwi. (2019). "Tanggung Jawab Notaris akibat Pembuatan Akta Nominee". *Jurnal Rechten*, Vol. 1 No. 1.
- Gunawan Widjaja. (2008). "Nominee Shareholders dalam Perspektif UUPT Baru dan Undang-Undang Penanaman Modal serta Permasalahannya dalam Praktik". *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Vol. III Edisi 4.
- Indiraharti, N. S. (2014). Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum PRIORIS*.
- Jaury, I. S. (2013). *Pencantuman Waktu Kehadiran Antara Penghadap Di Dalam Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Mempengaruhi Keotentikan Akta Notaris Atau Akta Ppat* (Doctoral Dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).
- Miggi Sahabati. (2011). *Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan Kepastian Hukum bagi Pihak Pemberi Kuasa*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moch. Isnaeni. (2004). "Jalinan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Bisnis". Makalah Seminar Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muhammad Taufiq Budiarto. (2019). "Sudut Pandang Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee". *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 6.
- Patricia Artjan Mylano. (2025). *Keabsahan Perjanjian Nominee atas Kepemilikan Hak atas Tanah antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang di Waarmerking oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Dps)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Paulinah, P., Qamariyanti, Y., & Faishal, A. (2022). Penguasaan Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Nominee di Indonesia. *Banua Law Review*.

- Rahmad Hendra. (—). “Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1.
- Rajagukguk, E. Y. B., & Debora, D. (2025). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Teknologi Mesin UDA*.
- Rizka Nurmadany. (2020). *Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta*. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Samuel Tandiar Raharja. (2023). *Penandatanganan Akta Notaris yang Tidak Dilakukan secara Bersamaan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sari, Y. D. *Tanggung Jawab Notaris Dala pembuatan Akta Yang Dibatalkan Pengadilan Berkaitan Dengan Perjanjian Nominee Pada Penguasaan Tanag Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Studi Putusan Nomor 259/Pdt. G/2020/PN. Gin* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sarapi, V. V. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Lex Privatum*, 9(2).
- Sri Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir. (2023). “Tinjauan Hukum tentang Kecakapan Tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan”. *Jurnal Normatif*, Vol. 1 No. 2.
- Supriadi Jufri. (2025). “Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas”. Vol. 9 No. 1.
- Yosia Hetharie. (2019). “Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 25 No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PUTUSAN

PENGADILAN/WEBSITE/KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Definisi “Akta”).

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian.

Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps, 2020.

Pengadilan Negeri Gianyar. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, 2020.

